Dimensi Sosial Politik Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (Analisis Perumusan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional)

**Oleh
Nur Amalia Zuhra**

ABSTRAK

High demand from society for the reform and repair system of governance and administration in Indonesia arised since 1998. In respond to that demand, Abdurahman Wahid at the tine, decided to stabilish Ombudsman National Comission to he industry is controlling state institution. The inisiation of forming the Ombudsman National Commission declared by Abdurahman Wahid''s Indonesian President at that time. In march, 20th 2000 president made president's decision number 44/2000 about Forming of The Ombudsman National Commission There were five institutions which involved in the formulation of the policy for forming Ombudsman National Commission. There are the executive's and yudikatif, the interest groups, perss, the community's member and the attitude and the behaviour of the decision maker. The five institutions get involved as a part of social and political factor on forming Ombudsman National Commission.

Sejak tahun 1998 banyak tuntutan dari masyarakat untuk mereformasi dan memperbaiki sistem pemerintahan dan administrasi di Indonesia. Oleh karena itu Presiden Abdurahman Wahid membuat kebijakan membentuk lembaga pengawasan penyelenggara negara yang bernama Komisi Ombudsman Nasional. Rencana awal pembentukan Komis Ombudsman Nasional pertama kali dicetuskan oleh Presiden Abdurahman Wahid saat mengadakan pertemuan dengan Marzuki Darusman dan Antonius Sujata. Pada 20 Maret 2000 presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Terdapat lima pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, yaitu badan eksekutif dan yudikatif, kelompok kepentingan, media massa, anggota masyarakat, sikap dan perilaku pembuat keputusan. Kelima pihak tersebut menjadi bagian dari factor sosial politik pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

Kata Kunci: Faktor sosial politik, Perumusan Kebijakan, Komisi Ombudsman Nasion

PENDAHULUAN

Good Governance muncul sebagai kritikan atas dominasi lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tujuan pemberlakuan *Good Governance* adalah terciptanya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah selain fungsi distribusi, regulasi, dan proteksi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan yang berujung pada KKN (korupsi, kolusi nepotisme) di berbagai birokrasi pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Untuk menjamin pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur pemerintah, maka dibutuhkan suatu lembaga formal yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu lembaga pengawasan eksternal milik pemerintah yang bertugas mengawasi pemberian pelayanan publik oleh aparatur negara adalah Ombudsman. Alasan pembentukan berbagai lembaga pengawas penyelenggara negara, tidak terkecuali Ombudsman, adalah untuk merespon desakan masyarakat yang menginginkan perubahan (reformasi) agar pemerintahan menjadi lebih transparan, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (dalam Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2007).

Di Indonesia wacana pembentukan Ombudsman sudah lama sekali berkembang, akan tetapi baru menjadi kenyataan pada tahun 2000. Pada saat itu sedang bergulir isu reformasi untuk

menuju negara yang lebih demokratis. Sujata (2002:2) menjelaskan bahwa pada November 1999 Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berinisiatif memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk mendiskusikan tentang konsep pengawasan baru terhadap penyelenggara negara. Pada 17 November 1999 diadakan pertemuan antara Jaksa Agung Marzuki Darusman, Antonius Sujata, dan Gus Dur. Hasil dari diskusi tersebut Gus Dur menyepakati pembentukan lembaga pengawasan penyelenggara negara yaitu Ombudsman.

Pada tanggal 8 Desember 1999 diterbitkanlah Keppres No.155 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Keppres tersebut ternyata keluar dari pembicaraan antara Gus Dur, Marzuki Darusman, dan Antonius Sujata. Keppres tersebut hanya membentuk Tim Pengkajian Ombudsman, sedangkan lembaga Ombudsman tidak dibentuk. Oleh karena itu Marzuki Darusman bersama Antonius Sujata kembali menemui Gus Dur untuk mengklarifikasi Keppres No.155 Tahun 1999, dan merekomendasikan pembentukan Ombudsman. Akhirnya Gus Dur mengeluarkan Keppres No.44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, penentuan faktor sosial politik dalam pembentukan Komisi Ombudsman Nasional menjadi menarik untuk diteliti terutama dalam perumusan kebijakan tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Sebagai sebuah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah, proses pembentukan Ombudsman juga dipengaruhi oleh faktor-faktor

tertentu. Diantara faktor tersebut juga terdapat faktor sosial politik atau ada hubungan antara tuntutan masyarakat dengan unsur kekuasaan dalam pembentukan Ombudsman.

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pembentukan Komisi Ombudsman Nasional? (2) Apa sajakah faktor sosial politik yang mendasari pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (analisis perumusan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional)?

TINAJUAN PUSTAKA

Soltau (budiardjo, 2004:39) menyatakan negara adalah alat (agency) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Sedangkan Laski menyatakan "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. (Budiardjo, 2004:40). Dari definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang bersifat memaksa dan sah di dalam masyarakat tersebut. Suatu negara biasanya dipimpin oleh sekelompok orang yang biasa disebut pemerintah. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada warganya. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan

kepuasan pelanggan. Lijan Poltak Sinambra (2006:14) mendefinisikan pelayanan publik sebagai pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah, dilakukan oleh penyelenggara negara dalam birokrasi maupun di Badan Usaha milik Negara (BUMN). Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan di Indonesia termasuk pelaksanaan pelayanan publik bersifat sentralistik. Artinya sebagian besar kebijakan diambil oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankannya saja. Sistem sentralistik ini memberikan kekuasaan yang besar bagi pemerintah pusat untuk mengatur segala hal. Ini menyebabkan semakin besarnya kesempatan untuk terjadinya penyelewengan tugas pemerintah. Pemerintah akhirnya mulai melakukan berbagai tindakan maladministrasi yang menyebabkan buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, pemerintah melakukan reformasi administrasi publik. Miftah Thoha (Ibrahim, 2008:14) melihat reformasi administrasi negara (publik) meliputi reformasi kepemimpinan, kelembagaan dan reformasi sistem administrasi publik itu sendiri, terutama untuk kasus Indonesia. Upaya nyata untuk melakukan reformasi pelayanan publik salah satunya melalui pembentukan lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan atas instansi pelayanan publik. Lembaga tersebut diantaranya adalah Ombudsman.

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional ditandai dengan

dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam perumusan kebijakan tersebut terdapat faktor sosial politik baik dari lingkungan ekstern maupun intern pemerintah yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan negara akan lebih mudah dipelajari apabila menggunakan suatu pendekatan atau model tertentu (Islamy, 2000:34). Salah satunya adalah model sistem politik yang diuraikan David Easton. Model ini didasari pada konsep teori informasi (*inputs, withinputs, outputs dan feedback*) dan memandang kebijaksanaan negara sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada di sekitarnya. Kebijakan negara dipandang oleh model ini sebagai hasil (*output*) dari sistem politik. Konsep sistem politik mempunyai arti sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*support*) dan sumber-sumber (*resources*) – semuanya ini adalah masukan-masukan (*inputs*) – menjadi keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang otoratif bagi seluruh anggota masyarakat (*outputs*). Dengan singkat dikatakan bahwa sistem politik berfungsi mengubah *inputs* menjadi *outputs*. Sistem politik yang terdiri dari badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif; kelompok kepentingan, media massa; anggota-anggota masyarakat; tokoh-tokoh masyarakat (golongan elit); sikap dan perilaku

pembuat keputusan dan sebagainya semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah *inputs* menjadi *outputs* (Islamy, 2000:44-45).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus pada penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama adalah proses pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Kedua faktor sosial politik dalam perumusan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional merupakan salah satu bentuk reformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional juga bertujuan untuk merubah paradigma para penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat.

Ide pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dilontarkan oleh Presiden Abdurahman Wahid saat berdiskusi dengan Antonius Sujata dan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman pada November 1999. Akhirnya pada 16 Desember 1999 Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pngkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Isi Keppres ini ternyata melenceng

dari hasil diskusi yang dulu dilakukan Presiden Abdurahman Wahid dengan Antonius Sujata dan Marzuki Darusman. Sebab hasil diskusi tersebut seharusnya presiden membentuk lembaga Ombudsman, sedangkan isi Keppres ini hanya membentuk Tim Pengkajian Pembentukan Ombudsman.

Antonius Sujata dan Marzuki Darusman kembali menghadap Presiden Abdurahman Wahid untuk mengklarifikasi Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman, dan tetap merekomendasikan untuk langsung membentuk lembaga Ombudsman. Alasan Antonius Sujata ingin presiden langsung membentuk lembaga Ombudsman adalah adanya desakan kuat dari masyarakat dan mahasiswa yang menghendaki pemberantasan KKN dan perbaikan pelayanan umum. Akhirnya Presiden Abdurahman Wahid setuju untuk langsung membentuk lembaga Ombudsman. Tanggal 10 Maret 2000 Presiden Abdurahman Wahid resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Presiden Abdurahman Wahid melantik Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional yang pertama pada tanggal 20 maret 2000 di Istana Negara.

Berikut ini dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dengan menggunakan model sistem politik.

1. Badan Eksekutif dan Yudikatif

Badan eksekutif negara yang terlibat dalam diantaranya adalah Presiden Abdurahman Wahid dan Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak beserta jajaran mereka yang membantu merumuskan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Fungsi Presiden Abdurahman Wahid adalah sebagai pencetus ide pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dan yang mengesahkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Sedangkan badan yudikatif yang berperan dalam perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga Kejaksaan Agung yang saat Keppres tersebut dibuat dipimpin oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman, dan dibantu oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Antonius Sujata. Mereka berdua merekomendasikan kepada presiden untuk segera membentuk lembaga Komisi Ombudsman Nasional karena mengingat desakan masyarakat dan mahasiswa yang semakin kuat menghendaki pemberantasan KKN dan perbaikan pelayanan umum.

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan yang ikut menjadi faktor pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya adalah kelompok-kelompok yang menyatakan Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara terkorup. Seperti *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang menyimpulkan Indonesia sebagai negara paling korup ketiga setelah Cina dan Vietnam. Penelitian yang dilakukan *Transparency Internasional* (TI) tahun 1995 juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara

paling korup di dunia dengan indeks 1,94, di bawah Cina (2,16) dan Pakistan (2,25). Berdasarkan laporan TI yang diumumkan pada 31 Juli 1997, dilaporkan Indonesia berada di peringkat ketujuh negara-negara paling korup di dunia.

3. Media Massa

Media massa merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Fungsinya adalah sebagai kontrol sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Peran media massa dalam perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya memberitakan tentang beberapa kasus maladministrasi yang melibatkan aparatur negara terutama saat masa Orde Baru.

4. Anggota Masyarakat

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari luar pemerintah, yaitu dari masyarakat dan mahasiswa untuk menyelesaikan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Masyarakat dan mahasiswa yang merasa dirugikan oleh perilaku penyelenggara negara, semenjak munculnya gerakan reformasi menjadi semakin sering dan berani menyampaikan rasa kekecewaan mereka kepada pemerintah. Dalam kondisi mendapat tekanan masyarakat yang menghendaki terjadinya perubahan menuju pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, maka pemerintah saat itu berusaha melakukan beberapa perubahan sesuai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan terhadap penyelenggara negara, bernama Komisi Ombudsman Nasional.

5. Sikap dan perilaku pembuat keputusan

Dalam perumusan kebijakan, sifat pribadi dari pembuat kebijakan juga turut mempengaruhi hasil kebijakan. Sifat-sifat pribadi yang dimaksud adalah sifat pribadi pembuat kebijakan, yang dalam penelitian ini ialah Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pembuat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Dari hasil wawancara Antonius Sujata dengan TVRI Sumatra Utara pada Februari dapat disimpulkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid memiliki sikap kepedulian akan penderitaan rakyat yang menjadi korban dan objek dari pelayanan, sedangkan aparat pengawasan kurang efektif. Beliau memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pemerintahan yang bersih. Akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

Pada perumusan kebijakan yang menggunakan model sistem politik, faktor lingkungan juga mempengaruhi output atau hasil dari kebijakan tersebut. Lingkungan yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan internal.

1. Lingkungan Eksternal

a. Tekanan Lembaga Donor Dana Internasional

Faktor lingkungan eksternal diantaranya berasal dari tuntutan lembaga pendonor dana internasional yang menginginkan pemerintah merubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik dengan menggunakan prinsip *Good*

Governance. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menimpa negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot sangat drastis, utang luar negeri menjadi membengkak dalam tempo singkat (Sembel, 2001:11). Untuk bisa keluar dari krisis tersebut, negara-negara di Asia harus meminjam dana dari lembaga donor milik negara-negara liberal seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank.

Lembaga donor tersebut mengharuskan negara yang meminjam dana dari mereka untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pemerintahannya. Hal ini sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka untuk dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan. Pada awal 1990-an, diadakan pertemuan negara-negara donor yang dipromotori oleh Bank Dunia. Pertemuan ini kemudian dikenal sebagai “Konsensus Washington”. Dalam pertemuan ini terungkap banyak bantuan asing “bocor” akibat praktik *bad governance* (pemerintahan yang tidak akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dll). Oleh karena itu, kemudian disepakati bahwa penerima bantuan harus diberi persyaratan (*conditionality*), yaitu kesediaan untuk mempraktekan *good governance* (keterbukaan, demokrasi, *checks and balance*, dan lain-lain). Maka sejak pertengahan 1990-an, bantuan asing disertai kondisionalitas untuk mengurangi kebocoran bantuan asing dan efektivitas pemerintahan negara berkembang (Santosa, 2008:130). Penerapan prinsip *Good Governance* pada pemerintahan Indonesia membuat pemerintah Indonesia harus menjamin adanya

pelayanan publik yang baik yang diberikan oleh penyelenggara negara. Salah satu upaya pemerintah adalah membentuk lembaga pengawasan pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. Lembaga tersebut adalah Komisi Ombudsman Nasional.

b. Globalisasi Ekonomi

Indonesia ikut dalam globalisasi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan dagang dan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara lain. Salah satu bentuk globalisasi perekonomian adalah terbentuknya pasar bebas dunia. Para pengusaha yang ada di pasar bebas menuntut pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan tersebut adalah adanya sistem birokrasi dan pelayanan publik yang buruk.

Globalisasi perekonomian yang terjadi saat ini menuntut pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik guna meningkatkan investasi atau modal asing yang masuk ke Indonesia. Perbaikan pelayanan publik ini juga untuk merespon permintaan investor asing untuk merubah sistem birokrasi. Akhirnya pemerintah masa reformasi membentuk Komisi Ombudsman Nasional untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pembentukan komisi ini juga menandai kesungguhan tekad pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi dan administrasi negara di Indonesia.

2. Lingkungan Internal

a. Tuntutan Demokratisasi Pelayanan Publik

Lingkungan internal dari negara Indonesia yang mempengaruhi perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya adanya desakan dari masyarakat Indonesia untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada. Keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru cenderung menganut budaya patologi birokrasi (Hariandja, 2003: 116). Budaya patologi ini menyebabkan adanya krisis kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah. Pemerintah masa Orde Baru lebih cenderung memberi kemudahan dalam pelayanan publik kepada pihak-pihak yang dekat atau mempunyai hubungan baik dengan pihak penguasa. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang percaya kepada tokoh-tokoh yang menjalankan pemerintahan. Masyarakat Indonesia menuntut pemerintah masa reformasi untuk memperbaiki sistem birokrasi dan pelayanan publik yang ada di Indonesia.

Dengan latar belakang seperti itu, pemerintah ingin merubah citra sistem birokrasi dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka pemerintah pada masa reformasi berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. Salah satu caranya dengan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik yang bernama Komisi Ombudsman Nasional. Hal ini penting dilakukan karena untuk membuat masyarakat percaya kepada pemerintah, sehingga akan kembali memilih mereka pada

pemilu. Dengan demikian tokoh-tokoh yang ada dalam pemerintahan Indonesia akan tetap bisa melanggengkan kekuasaan mereka di Indonesia.

b. Tuntutan Pemulihan Krisis Ekonomi

Pada tahun 1997 krisis moneter menimpa negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Krisis di Indonesia salah satu penyebabnya adalah sistem birokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru yang memberi kemudahan bagi pemilik modal untuk menguasai sumber daya yang ada di Indonesia, termasuk yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Para pemilik modal ini diberikan kemudahan karena memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Saat krisis moneter berlangsung, banyak perusahaan-perusahaan besar yang diberikan kemudahan tersebut mengalami kebangkrutan. Modal yang dimiliki oleh para pengusaha ini banyak yang dibawa lari ke luar negeri. Hutang Indonesia kepada luar negeri juga semakin meningkat. Akibatnya nilai tukar rupiah turun terhadap dolar, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, dan banyak pengangguran.

Masyarakat yang merasa menderita akibat krisis yang menimpa Indonesia, meminta pemerintah masa reformasi segera mengatasi krisis tersebut. Tuntutan-tuntutan dari masyarakat tersebut sering disuarakan oleh mahasiswa melalui aksi unjuk rasa kepada pemerintah. Seiring dengan peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, tuntutan-tuntutan masih terus digulirkan sampai menyentuh wilayah-wilayah yang paling rawan dari kekuasaan Orde Baru.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan keadaan dari krisis ekonomi ialah dengan merubah sistem birokrasi dan pelayanan publik yang ada di Indonesia menjadi lebih baik. Dengan merubah sistem birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia menjadi lebih baik dan bebas KKN, diharapkan dapat meningkatkan investasi ke Indonesia. Perbaikan pelayanan publik juga diharapkan dapat membuat pengusaha kecil semakin mengembangkan usahanya. Salah satu usaha untuk memperbaiki pelayanan publik adalah dengan mendirikan Komisi Ombudsman Nasional. Dengan adanya komisi ini diharapkan dapat mengurangi maladministrasi dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian Indonesia akan cepat melalui krisis moneter yang berlangsung.

KESIMPULAN

Selama pemerintahan Orde Baru, pemerintah sering melakukan penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan krisis pada tahun 1997. Hal tersebut membuat mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Mundurnya Soeharto dijadikan awal perubahan paradigma pelayanan publik, yang semula lebih mendahulukan kelompok tertentu terutama dari kelompok ekonomi ke atas, menjadi melayani semua masyarakat dari segala golongan. Guna memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Komisi ini

betugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya (1) Badan Eksekutif dan Yudikatif, (2) Kelompok kepentingan, (3) Media Massa, (4) Anggota Masyarakat, (5) Sikap dan perilaku pembuat keputusan.

Faktor sosial politik pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal tersebut berasal dari lembaga donor dana internasional dan inestor asing yang menginginkan pemerintah Indonesia menerapkan *Good Governace*. Serta adanya tuntutan globalisasi perekonomian.

Sedangkan lingkungan internal yang menjadi faktor sosial politik pembentukan Komisi Ombudsman Nasional adalah adanya budaya patologi yang ada di Indonesia. Budaya tersebut menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu juga untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Untuk itu pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional untuk memberikan jaminan adanya pengawasan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Adijondro, George Jubus. 2006. *Korupsi Kepresidenan*. Yogyakarta. LkiS.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djajadi, M. Iqbal, dkk. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Djuhandar, Erom. 2005. *Sosiologi Politik*. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.
- Fatah, Eep Saefulloh. 1999. *Bangsa Saya Yang Menyebalkan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Hariandja, Denny B.C. 2003. *Birokrasi Nan Pongah*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Hikam, Muhammad A.S. 1999. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokrasi di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Maran, Rafael Ragan. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Rodeo, Carlton Clymer dkk. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Rahagrafindo Persada.
- Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sembel, Roy. 2001. *Berpikir Ekonomis Di Masa Krisis*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Steiner, George A. dan John B. Miner. 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sujata, Antonius dan Surachman. 2002. *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*. Jakarta. Komisi Ombudsman Nasional.
- Sujata, Antonius. dkk. 2002. *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. Jakarta. Komisi Ombudsman Nasional.
- Sujata, Antonius. dkk. 2006. *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta. Komisi Ombudsman Nasional.
- Sutarto. 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana, dan Azhari. 2008. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung. PR Refika Aditama..
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Untung, Bejo. dkk. *Studi Perbandingan Komisi Informasi dan Ombusman RI*. Jakarta. Yayasan SET.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dokumen-Dokumen:**
depdagri.go.id. 2006. *Good Governance*. (online).

(http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=GoodGovernance&op=detail_artikel&id=4, diakses 6 April 2009).

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/03/05123652/doa.umat.lintas.agama.untuk.gus.dur>, diakses 2 Februari 2010

http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurahman_Wahid, diakses 12 April 2010

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_Publik, diakses 22 Maret 2010

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281968_1998%29, diakses 12 April 2010

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281998-sekarang%29, diakses 12 April 2010

<http://groups.yahoo.com/group/kunci-l/message/2261>, diakses 9 Februari 2010

<http://www.asiarisk.com>, diakses 17 Desember 2009

<http://mrdewa.blogspot.com/2008/03/reformasi-administrasi-definisi-dan.html>, diakses 24 Agustus 2009

<http://one.indoskripsi.com/node/7332>, diakses 22 Maret 2010

<http://www.pemantauperadilan.com>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.

Laporan Tahunan 2002 Komisi Ombudsman Nasional.

Laporan Tahunan 2007 Komisi Ombudsman Nasional.

Laporan Tahunan 2008 Ombudsman Republik Indonesia.

Majalah Sinar Nomor 32/Tagun III, 4 Mei 1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.